

Judul : Bansos jangan dicurigai untuk kepentingan politik
Tanggal : Jumat, 12 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Bansos Jangan Dicurigai Untuk Kepentingan Politik



Puteri Anetta Komarudin

ANGGOTA Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin berpendapat bahwa pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin soal penggelontoran bantuan sosial alias bansos sama saja melestarikan kemiskinan, tidak berkaitan dengan isu politisasi bansos.

"Karena beliau berpesan agar porsi bansos diturunkan secara bertahap, seiring tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga semakin meningkat," kata Puteri, Kamis (11/1/2024).

Saat ini, upaya tersebut juga telah dilakukan Pemerintah dengan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir.

Misalnya pada 2020, porsi anggaran perlinsos mencapai Rp 498 triliun. Tapi, turun menjadi Rp 468,2 triliun pada 2021, lalu turun menjadi Rp 460 triliun pada 2022 dan menjadi Rp 443,5 pada 2023.

Anggaran ini sangat diperlukan untuk menopang daya beli dan konsumsi masyarakat di tengah tekanan akibat merebaknya pandemi pada 2020. Hingga tren kenaikan harga komoditas dan fenomena El-Nino.

"Kami merasa bansos ini masih perlu diteruskan sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin," kata Puteri.

Tentunya, menurut Puteri, harus disertai dengan perbaikan dari segi mekanisme penyaluran supaya semakin akurat dan tepat sasaran. Apalagi sekarang sudah ada basis data kependudukan melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dapat menjadi acuan untuk penyaluran bansos.

Dia meminta jangan sampai penyaluran bansos ini disalahartikan atau dicurigai untuk kepentingan politik.

"Sejatinya bansos ini merupakan program reguler yang telah berjalan selama beberapa tahun," tegas Puteri.

Penerimanya pun ada kriterianya tersendiri. Jadi, tidak semua masyarakat menerima bansos.

"Jangan sampai karena pemilu, justru kita mengabaikan hak dari masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu, salah satu kunci adalah dari segi pengawasan dan pelaporan. Maka, kita harus awasi bersama penyaluran bansos ini agar menasar kepada kelompok yang memang berhak menerima," tutur Puteri. ■ KAL